

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Harus diakui bahwa demokrasi yang dijalankan di Indonesia memberi banyak peran positif bagi kehidupan politik. Misalnya, adanya kebebasan untuk berekspresi, berserikat, berpendapat, memilih dan mengamalkan nilai agama, dan memberi ruang bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan bersama. Namun, tidak dapat dimungkiri bahwa selalu saja ada penodaan terhadap esensi demokrasi. Ada kelompok tertentu di Indonesia yang memanfaatkan ruang kebebasan demokrasi untuk memproduksi kekerasan demi kekerasan. Selain korupsi yang merajalela, hukum yang amburadul dan perekonomian yang terseok-seok, persoalan lain yang juga berbahaya bagi prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia ialah diskriminasi terhadap hak-hak kaum minoritas. Kelompok minoritas di Indonesia, sebagaimana yang telah diuraikan penulis dalam karya ini, yang sering mengalami tindakan diskriminatif adalah kelompok ras tertentu, etnis, agama, penyandang disabilitas dan LGBT. Mereka kerap kali menjadi korban tindakan sewenang-wenang negara dan kelompok mayoritas yang merasa diri lebih dominan atau lebih berpengaruh dalam hidup berbangsa dan bernegara. Dengan itu pula kelompok minoritas ini sering hidup dalam ancaman, merasa diteror dan diliputi ketakutan. Jelaslah bahwa pengabaian atau penolakan terhadap kaum minoritas, berpotensi melabrak demokrasi itu sendiri yang pada dasarnya mengandung nilai-nilai hak asasi manusia, kesetaraan, kesederajatan, kebebasan, toleransi dan pluralisme.

Kita bisa melihat bahwa ada kemandegan serius dalam praktik berdemokrasi masyarakat Indonesia di tengah kemajuan dunia yang semakin pesat. Ada kecendrungan bahwa orang selalu ingin hidup dengan orang dari suku, ras, agama dan etnis yang sama. Akhirnya, dalam kehidupan publik muncul sebutan “mereka” dan

“kita”. “Mereka” yang berada di luar “kita” dianggap sebagai ancaman, sehingga wajib dibinasakan. Ruang hidup bersama di Indonesia pun terkadang hanya nyaman bagi para penguasa, oligark dan kelompok mayoritas atau yang merasa diri berpengaruh. Kelompok minoritas atau mereka yang tidak memiliki akses kepada kekuasaan harus siap menanggung eksploitasi dan diskriminasi. Dalam kecendrungan ini, sudah jelas bahwa kelompok mayoritas selalu menang dan berada pada posisi kuat, sedangkan kelompok minoritas sudah pasti kalah dan diabaikan. Akomodasi berlebihan pada logika mayoritas inilah yang dalam dinamika sosial politik mutakhir Indonesia mengarah pada arus politik penyeragaman. Penyeragaman, tidak sesuai dengan fakta kemajemukan bangsa Indonesia dan tidak ada ruang bagi pengakuan akan perbedaan. Jadi, yang menjadi lebih kuat ialah kecendrungan akan keseragaman ketimbang toleransi dan apresiasi terhadap perbedaan. Keberagaman tidak lagi diterima sebagai kekayaan atau keutamaan bersama untuk membangun kualitas hidup berbangsa, tetapi justru menjadi prakondisi langgengnya aneka kekerasan, dimana korbannya selalu kelompok minoritas.

Kasus diskriminasi terhadap kelompok minoritas semestinya tidak perlu terjadi di Indonesia yang memiliki dan sudah menyepakati pilar-pilar utama kebangsaan, seperti Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, secara manusiawi, seorang manusia tidak memiliki alasan untuk mendiskriminasi dan mengeskpolitasi manusia lain. Setiap individu unik dan memiliki martabat yang berharga. Sesungguhnya, tanpa harus ada aturan-aturan dan kesepakatan-kesepakatan bersama, masing-masing individu sudah seharusnya menyadari keberadaannya sebagai manusia dan karena itu juga harus menghargai manusia lain. Setiap orang (warga negara) memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menghargai sesama dan menciptakan kesejahteraan bagi hidup bersama. Dalam konteks Indonesia, pilar-pilar utama kebangsaan yang sudah disebutkan sebelumnya merupakan landasan dasar sekaligus sebagai bintang penuntun bagi segenap masyarakat Indonesia untuk menjaga dan memperkokoh bangunan keindonesiaan. Di tengah faktum pluralitas, warga negara Indonesia harus selalu disadarkan untuk

memaklumi perbedaan yang ada, terbuka dan hidup bersama dengan orang yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Justru di situlah letak keindahan dari keanekaragaman suku, agama, ras dan golongan di Indonesia.

Fakta pluralitas di Indonesia harus selalu dijaga, agar tidak mudah goyah, apalagi hanya karena disebabkan oleh kesewenang-wenangan negara dan kepongahan kelompok mayoritas untuk mendiskriminasi kelompok minoritas. Sudah menjadi rahasia umum bahwa terdapat banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kasus diskriminasi terhadap kelompok minoritas di Indonesia. Faktor paling utama yang mendatangkan perlakuan diskriminatif dalam hidup bersama adalah prasangka, stigma dan stereotip. Biasanya, kelompok mayoritas tidak langsung menyerang atau bertindak diskriminatif terhadap minoritas etnis, ras, agama, penyandang disabilitas atau LGBT. Penolakan atau rasa tidak suka terhadap kelompok minoritas sudah tertanam sangat lama melalui prasangka, stigma atau stereotip. Pada saatnya, ketika kelompok minoritas yang distigma buruk itu melakukan kekeliruan atau karena dikambinghitamkan oleh kelompok tertentu, maka mereka bisa saja dipukul, disiksa, bahkan bisa dibunuh. Kita harus mengakui bahwa salah satu alasan mendasar yang membuat kasus diskriminasi terhadap kelompok minoritas masih bertumbuh subur di Indonesia adalah karena disebabkan oleh kuatnya prasangka, stigma dan stereotip. Faktor-faktor lain yang menyebabkan munculnya fakta diskriminasi terhadap kelompok minoritas di Indonesia adalah kurangnya pengetahuan akan kelompok lain, adanya keengganan untuk terbuka dan bekerja sama, kehidupan politik dan ekonomi yang lemah, penegakan hukum yang amburadul dan pendidikan yang hanya berorientasi pada nilai akhir.

Kita tidak mau, diskriminasi terhadap kelompok minoritas berdasarkan ras, etnik, agama, disabilitas dan orientasi seksual menjadi budaya yang terus berkembang di Indonesia di masa depan. Budaya bangsa kita adalah gotong-royong, berbela rasa, bermusyawarah-mufakat, saling mendukung dan melengkapi. Indonesia menjadi rumah bersama yang harus dijaga dan dihidupi tanpa ada satu kelompok tertentu yang bertindak sewenang-wenang terhadap kelompok lain yang dianggap lemah. Kita semua

memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama menjaga bangunan keindonesiaan agar tetap kokoh dan menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menyiapkan generasi masa depan bangsa yang jauh dari nafsu kekerasan dan diskriminasi ialah dengan menghidupkan (kembali) pendidikan kewarganegaraan.

Melalui pendidikan kewarganegaraan, segenap warga negara Indonesia, baik di sekolah-sekolah maupun di lembaga-lembaga informal dan masyarakat umum disadarkan bagaimana menjadi warga negara yang baik di tengah faktum keberagaman. Berkaitan dengan itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pendidikan itu berjalan baik di sekolah-sekolah, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Para guru dan pendidik harus memiliki pandangan dan cara mendidik yang sinkron dengan arah pendidikan nasional dan cita-cita bersama bangsa Indonesia. Para guru dan pendidik pertama-tama harus menunjukkan teladan yang baik dengan tidak bertindak diskriminatif dengan para peserta didik. Tidak boleh ada kebiasaan pilih kasih dalam proses belajar mengajar di kelas. Semua peserta didik harus dilayani, diajarkan dan dididik secara setara, tanpa ada motivasi-motivasi tersembunyi yang justru mencoreng eksistensi sekolah sebagai wadah pembudayaan nilai-nilai kebangsaan.

Di sekolah-sekolah juga harus diajarkan empat pilar utama kebangsaan, Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika. Berkenaan dengan itu, Hak Asasi Manusia (HAM) juga harus dapat diajarkan secara benar kepada generasi masa depan bangsa. Selain itu, mengajarkan kepada mereka tentang sivilitas dan pembudayaan kebernalaran publik. Para generasi muda bangsa perlu diajarkan tentang nilai kesetaraan, kesederajatan, demokrasi, kebebasan dan toleransi, serta melatih mereka untuk berpikir secara kritis dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendidikan kewarganegaraan di sekolah dapat membantu para peserta didik untuk berpikir tentang dan hidup bersama dengan orang lain yang berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda.

Pembudidayaan sivilitas dan kebernalaran publik itu, tidak hanya dilakukan di lembaga-lembaga pendidikan formal, tetapi juga di lembaga-lembaga lain, seperti LSM, media massa dan forum prodemokrasi lainnya. Lembaga semacam ini dapat menjadi corong demokrasi yang memiliki tanggung jawab untuk memberi informasi yang diperlukan warga negara dan mendidik mereka menjadi warga negara yang kritis dan tahu menerima dan menghargai pluralitas pandangan dalam kehidupan bersama. Tugas dan tanggung jawab dari lembaga-lembaga independen yang mendukung demokrasi ini dapat dimaknai sebagai pendidikan kewarganegaraan. Sebab, tujuan dari keberadaan mereka sesungguhnya adalah merawat ruang publik yang sehat dan mendidik masyarakat Indonesia agar sanggup menjadi warga negara yang sadar akan faktum keberagaman dan menghargai sesama dari kelompok lain, termasuk kelompok minoritas. Ruang publik adalah milik seluruh warga negara yang memungkinkan mereka mengembangkan kreativitas, berdiskusi, berpikir kritis dan bekerja sama dalam banyak hal. Indonesia akan optimis menuju pada kemajuan di masa depan, apabila ruang publik diisi oleh hal-hal yang berkaitan dengan hidup bersama dan bukan memenuhi kepentingan kelompok tertentu.

Hasil dari pendidikan kewarganegaraan haruslah pribadi-pribadi yang mampu berpikir mandiri/kritis, mencintai perbedaan, menghargai demokrasi dan toleransi, menerima semua kelompok masyarakat tanpa pilih kasih. Pendidikan kewarganegaraan adalah persoalan menanamkan berbagai kebiasaan, kebajikan serta jati diri bangsa yang secara khusus mendukung eksistensi kaum minoritas. Kalau semua warga bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai penting ini lewat pendidikan kewarganegaraan, maka perjuangan mulia untuk mengakomodasi hak-hak kaum minoritas dapat terwujud. Penerimaan dan penghargaan terhadap hak-hak kaum minoritas adalah jembatan emas menuju demokrasi yang lebih bermartabat. Demokrasi bermartabat juga ditentukan oleh sikap akomodatif terhadap hak-hak warga negara yang paling lemah, kaum minoritas.

4.2 Usul dan Saran

4.2.1 Bagi pemerintah

Pemerintah harus betul-betul menjalankan tugas negara untuk memastikan keamanan setiap warga negara. Negara harus dapat menegakkan hukum secara benar terutama berhadapan dengan kelompok-kelompok tertentu yang kerap kali mendiskriminasi kelompok-kelompok minoritas. Negara harus memastikan bahwa kelompok minoritas ras, etnis, agama, penyandang disabilitas dan LGBT di Indonesia selalu hidup dalam rasa aman dan hak-hak mereka dapat diekspresikan secara bebas di ruang publik. Negara, dalam hal ini pemerintah, juga tidak boleh bertindak diskriminatif baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui berbagai kebijakan dan undang-undang. Untuk meminimalisasi tindakan diskriminasi di masa depan, pemerintah diharapkan dapat bekerja lebih keras untuk memfasilitasi sekolah-sekolah mendidik dan mempersiapkan generasi muda bangsa yang sanggup membudayakan sivilitas dan kebernalaran publik.

4.2.2 Bagi Lembaga Pendidikan Formal (Sekolah Dasar-Perguruan Tinggi)

Lembaga pendidikan formal dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi hendaknya dapat menjalankan tanggung jawab secara benar untuk mempersiapkan para peserta didik yang kritis dan berkarakter baik. Para guru, dosen dan pendidik pertamanya mesti menunjukkan teladan hidup yang baik dalam proses belajar mengajar. Dalam arti bahwa guru, dosen dan pendidik tidak boleh bertindak diskriminatif di ruang kelas. Setiap peserta didik dari etnis, ras, agama manapun ataupun penyandang disabilitas dan sebagai LGBT harus dilayani dan dididik secara setara. Sebagai generasi penerus bangsa Indonesia, mereka juga harus diperkaya dengan pengajaran mengenai pilar-pilar utama kebangsaan, seperti Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika. Sekolah dapat mempraktikkan pendidikan kewarganegaraan dengan membudidayakan sivilitas dan kebernalaran publik kepada peserta didik.

4.2.3 Bagi Media, LSM, dan Forum Prodemokrasi

Media, LSM dan berbagai Forum prodemokrasi dapat melakukan pendidikan kewarganegaraan dengan memberi informasi yang benar kepada publik, mengembangkan sivilitas dan membuat diskursus publik. Hendaknya diskursus publik yang dibentuk bisa mendidik warga negara dan merangsang mereka untuk berpikir kritis, menjadi terbiasa dengan pluralitas pandangan di ruang publik dan pada saatnya dapat berkontribusi bagi kebaikan bersama. Media, LSM dan forum-forum prodemokrasi juga hendaknya membantu pemerintah dengan memberi penilaian, memberi kritikan dan solusi terhadap program-program yang dicanangkan. Selain itu, bekerja sama dengan sekolah-sekolah mensosialisasikan nilai-nilai kebangsaan kepada masyarakat, terutama generasi penerus bangsa Indonesia. Tujuan dari keberadaan media massa, LSM dan forum-forum prodemokrasi lainnya adalah merawat ruang publik agar tetap sehat dan senantiasa mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan bersama.

4.2.4 Bagi Para Generasi Penerus Bangsa

Generasi penerus bangsa atau kaum muda hendaknya tetap tekun belajar, memanfaatkan waktu luang untuk membaca buku, menulis dan berdiskursus. Perbiasakan diri untuk bergabung dengan kelompok-kelompok yang sanggup merangsang daya nalar untuk berpikir, memaklumi perbedaan dan menghargai pluralitas pandangan. Selain itu, belajar juga untuk mencari informasi tentang kelompok lain, misalnya agama tertentu, ras, etnis, penyandang disabilitas atau LGBT. Pengetahuan tentang kelompok-kelompok ini hendaknya merangsang kaum muda untuk kemudian bersikap terbuka, rendah hati untuk belajar dari orang lain dan menghargai kemajemukan. Hindari kebiasaan buruk memelihara solidaritas negatif, seperti menghina kelompok tertentu, membiarkan kekerasan terjadi atau mendukung terjadinya tindakan diskriminatif. Para generasi penerus bangsa Indonesia harus bisa keluar dari zona nyaman dan melibatkan diri dalam berbagai organisasi prodemokrasi.

4.2.5 Bagi Masyarakat

Hendaknya masyarakat bekerja sama untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa tanpa diskriminasi. Masyarakat harus menjadikan ruang publik sebagai ruang untuk mengembangkan nilai-nilai demokrasi dan kebangsaan, menghargai HAM, mengurangi atau menghilangkan prasangka, stigma dan stereotip terhadap kelompok-kelompok minoritas. Masyarakat mesti juga mencari informasi secara detail mengenai kelompok lain, kemudian terbuka untuk saling belajar dalam spirit keindonesiaan. Selain itu, masyarakat juga dapat mendukung lembaga-lembaga pendidikan formal, media, LSM dan forum-forum prodemokrasi dalam mempraktikkan pendidikan kewarganegaraan untuk mengajarkan sivilitas dan kebernalaran publik.

DAFTAR PUSTAKA

KAMUS DAN ENSIKLOPEDI

Dagun, Save M. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 2013.

International Encyclopedia of the Social Sciences, David L. Sills (editor), volume 9 (New York: The Macmillan Company & The Free Press, 1968).

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Theodorson, George A. & Achilles G. Theodorson, *A Modern Dictionary of Sociology*. London: Barnes & Noble Books, 1979.

The Encyclopedia Americana, Volume 19. Connecticut: Americana Corporation, 1980.

The New Encyclopedia Britannica, Volume 8. Chicago: Encyclopedia Britannica, Inc., 2010.

Waite, Maurice (ed.). *Paperback Oxford English Dictionary*. United Kingdom: Oxford University Press, 2012.

DOKUMEN-DOKUMEN

Republik Indonesia, “Undang-Undang RI”, Penjelasan mengenai Asas Persamaan di Hadapan Hukum dari Pasal 6 dan 7.

Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945*, Pasal 27 ayat (1).

Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999, Pasal I ayat 3 tentang Hak Asasi Manusia”.

Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis”.

Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 22 tentang Kebebasan Beragama”.

Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2005, Pasal 18 ayat 1 dan 2 tentang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan.”

UNHCHR, *The Convention on the Rights of Persons With Disabilities Adopted by the United Nations General Assembly on 13 December 2006.*

BUKU-BUKU

A. Dahl, Robert. *On Democracy*. Yale: Yale University Press, 1999.

A. Nugroho, Alois. *Komunikasi dan Demokrasi: Esai-esai Etika Komunikasi Politik*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2016.

Anshori, Aan. “Dinamika Kehidupan Kelompok Minoritas atau Keyakinan di Sidoarjo: Dari Diskriminasi Hingga Resistensi”, dalam Caroline Paskarina, dkk. (eds.), *Berebut Kontrol Atas Kesejahteraan: Kasus-kasus Politisasi Demokrasi di Tingkat Lokal*. Yogyakarta: Penerbit PolGov, 2015.

Azra, Azyumardi. *Menjaga Indonesia: dari Kebangsaan Hingga Masa Depan Politik Islam*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2020.

Baghi, Felix (ed.). *Pluralisme, Toleransi dan Demokrasi*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2012.

----- . *Redeskripsi dan Ironi: Mengolah Cita Rasa Kemanusiaan*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2014.

Basyir, Kunawi dkk. *Pancasila dan Kewarganegaraan*. Surabaya: Sunan Ampel Press, 2013.

Bertens, Kees. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.

Beraf, Charles. *Orang-orang Kalah: Problem Bernegara dalam Filsafat Politik J.J. Rousseau*. Yogyakarta: Penerbit Lamalera, 2012.

- Berenschot, Ward dan Gerry van Klinken. Pengantar dalam Ward Berenschot dan Gerry van Klinken (eds.), *Citizenship in Indonesia: Perjuangan atas Hak, Identitas dan Partisipasi*, penerj. Hananto P. Sudharto dan tim. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2019.
- Bielefeldt, Heiner. *Politik Kesetaraan: Dimensi-dimensi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan*, penerj. Trisno Sutanto. Bandung: Penerbit Mizan, 2019.
- Buchori, Mochtar. “Peranan Pendidikan dalam Pembentukan Budaya Politik di Indonesia”, dalam Sindhunata (ed.), *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan: Demokratisasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2000.
- Budiman, Hikmat. “Minoritas, Multikulturalisme, Modernitas” dalam Hikmat Budiman (ed.) *Hak Minoritas Dilema Multikulturalisme di Indonesia*, Edisi I. Jakarta: The Interseksi Foundation, 2005.
- Callan, Eamonn. “Pluralisme dan Pendidikan Kewargaan”, dalam Felix Baghi (ed.), *Pluralisme, Demokrasi dan Toleransi*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2012.
- Casanova, Jose. *Public Religions in the Modern World*. Chicago: The University of Chicago, 1980.
- Cogan, J.J. “Citizenship Education for the 21st Century: Setting the Context”, dalam John J. Cogan dan Ray Derricott, *Citizenship of the 21st Century: An Introduction Perspectives on Education*. London: Kogan Page Ltd, 1998.
- Cribb, Robert. “Pluralisme Hukum, Desentralisasi dan Akar Kekerasan di Indonesia”, dalam Dewi Fortuna Anwar, dkk (eds.), *Konflik Kekerasan Internal: Tinjauan Sejarah, Ekonomi-Politik dan Kebijakan di Asia Pasifik*, penerj. Masri Maris. Jakarta: Yayasan Obor, 2005.
- Dagger, Richard. “Konsep Liberal Republikan tentang Kewarganegaraan”, dalam Felix Baghi (ed.), *Kewarganegaraan Demokratis dalam Sorotan Filsafat Politik*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2009.

- Dungkal, Alex dkk, (eds.). *Pergulatan Pemikiran Dr. Jan Riberu: Pendidikan, Relasi Agama-Negara, dan Pancasila*. Jakarta: Flores Abdi Bangsa, 2018.
- Galltson, William. “Pendidikan Sipil dalam Negara Liberal”, dalam Felix Baghi (ed.), *Kewarganegaraan Demokratis dalam Sorotan Filsafat Politik*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2009.
- Gandhi HW, Teguh Wangsa. *Filsafat Pendidikan: Mazhab-Mazhab Filsafat Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Hamid, Usman (eds.). *Merancang Arah Baru Demokrasi: Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014.
- Hardiman, F. Budi. *Menuju Masyarakat Komunikatif: Ilmu, Masyarakat, Politik, dan Postmodernisme Menurut Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009.
- . *Demokrasi dan Sentimentalitas*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2018.
- . *Hak-Hak Asasi Manusia: Polemik dengan Agama dan Kebudayaan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2011.
- . *Dalam Moncong Oligarki: Skandal Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2013.
- . *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009.
- . *Massa, Teror dan Trauma*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2011.
- Haris, Syamsuddin. *Masalah-masalah Demokrasi dan Kebangsaan Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Obor, 2014.
- Haryatmoko, *Jalan Baru Kepemimpinan dan Pendidikan: Jawaban Atas Tantangan Disrupsi-Inovatif*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2020.

- Hasani, Ismail dan Bonar Tigor Naipospos, *Politik Diskriminasi Rezim Susiolo Bambang Yudhoyono*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2012.
- Hebert, Yvonne and Alan Sears, *Citizenship Education*. Canada: Canadian Education Association, tanpa tahun.
- Hendardi. “Keragaman dan Diskriminasi Penegakan Hukum”, dalam Benget Silitonga (ed.), *Kratos Minus Demos: Demokrasi Indonesia, Catatan dari Bawah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2012.
- Hiariej, Eric dan Olle Tornquist. “Politik Indonesia dan Kewargaan dalam Perspektif Sejarah” dalam Eric Hiariej dan Kristian Stokke (eds.), *Politik Kewargaan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2018.
- J. A., Denny. *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi: Data, Teori dan Solusi*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Jaques Juru, Ignasius. *Dislokasi Wacana Kewarganegaraan: Melampaui Liberalisme Menuju Wacana Agonistik*. Yogyakarta: Research Center for Politics and Governance UGM, 2012.
- Janoski, Thomas and Brian Gran. “Political Citizenship: Foundations of Rights”, dalam Engin F. Isin and Bryan S. Turner (eds.), *Handbook of Citizenship Studies*. London: Sage Publications Ltd, 2002.
- Jemadu, Aleksius. *Politik Global dalam Teori dan Praktik*, Edisi Ketiga. Yogyakarta: Suluh Media, 2017.
- K. Harman, Benny. Prolog dalam Otto Gusti Madung, *Politik Diferensiasi Versus Politik Martabat Manusia*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2011.
- Kali, Ampy. *Diskursus Seksualitas Michel Foucault*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2013.
- Karim, Abdul Gaffar. *Menegosiasi Ulang Indonesia*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- Keladu Koten, Yosef. *Partisipasi Politik: Sebuah Analisis Atas Etika Politik Aristoteles*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2010.

- Keladu Koten, Yosef. *Etika Keduniawian: Karakter Etis Pemikiran Politik Hannah Arendt*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2018.
- Kleden, Ignas. “Linking dan Delinking dalam Pendidikan dan Kebudayaan”, dalam Sindhunata (ed.), *Pendidikan: Kegelisahan Sepanjang Zaman*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001.
- Klinken, Gerry van. *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*, penerj. Bernard Hidayat. Jakarta: KITLV dan Yayasan Obor, 2007.
- Komnas HAM. “Upaya Negara Menjamin Hak-hak Minoritas di Indonesia”, *Sebuah Laporan Awal*. Jakarta: 2016.
- Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, *Keadilan Macet, Kekerasan Jalan Terus: Laporan Tahunan Kondisi HAM di Indonesia 2012*. Jakarta: KontraS, 2013.
- Kono, Redem. *Senandung Suara-suara Minor: Will Kymlicka tentang Hak-hak Minoritas dan Relevansinya dalam Konteks Indonesia*. Bandung: Pustaka Matahari, 2016.
- Kristiadi, J. “Mewujudkan Kehidupan Politik Yang Bermartabat Berdasarkan Pancasila” Epilog dalam Armada Riyanto, dkk (eds.), *Kearifan Lokal-Pancasila Butir-Butir Filsafat Keindonesiaan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2015.
- Kymlicka, Will. *Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism and Citizenship*. Oxford University Press, 2001.
- . “Pendidikan Kewarganegaraan”, dalam Felix Baghi (ed.), *Kewarganegaraan Demokratis dalam Sorotan Filsafat Politik*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2009.
- Lanur, Alex. “Dampak Konsep “Manusia” Filsafat Manusia yang Bersifat Personalistik pada Pendidikan”, dalam Sindhunata (ed.), *Menggagas Paradigma Baru*

- Pendidikan: Demokratisasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi.* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2000).
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila.* Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- . *Pendidikan Yang Berkebudayaan: Histori, Konsepsi, dan Aktualisasi Pendidikan Transformatif.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020).
- Liliweri, Alo. *Prasangka, Konflik dan Komunikasi Antarbudaya, Edisi Kedua.* Jakarta: Penerbit Kencana, 2018.
- Lindholm, Tore. "Justifikasi Filosofis dan Keagamaan Terhadap Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan," dalam Tore Lindholm, W. Cole Durham dan Bahia G. Tahzib Lie (eds.), penerj. Rafael Edy Bosko dan M. Rifa'I Abduh, *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh?* Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010.
- M. Dja'far, Alamasyah. *Intoleransi: Memahami Kebencian dan Kekerasan Atas Nama Agama.* Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018.
- M. Hadjon, Philipus. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara.* Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- M. Mongko, Silvianus. *Demokrasi Minus Demos.* Maumere: Penerbit Ledalero, 2016.
- Madung, Otto Gusti. *Politik Diferensiasi versus Politik Martabat Manusia.* Maumere: Penerbit Ledalero, 2011.
- . *Post-Sekularisme, Toleransi dan Demokrasi.* Maumere: Penerbit Ledalero, 2017.
- . *Politik Antara Legalitas dan Moralitas.* Maumere: Penerbit Ledalero, 2009.

- . *Filsafat Politik: Negara dalam Bentangan Diskursus Filosofis*.
Maumere: Penerbit Ledalero, 2013.
- . *Negara, Agama dan Hak-hak Asasi Manusia*. Maumere: Penerbit
Ledalero, 2014.
- Magnis Suseno, Franz. “Demokrasi Indonesia dalam Keadaan Bahaya”, dalam AE
Priyono dan Usman Hamid (eds.), *Merancang Arah Baru Demokrasi:
Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014.
- . *Berebut Jiwa Bangsa: Dialog, Perdamaian dan Persaudaraan*.
Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.
- Mahfud, Choirul. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Mietzner, Marcus. “Stagnasi Demokratik Indonesia: Elite Konservatif vs Masyarakat
Sipil” dalam AE Priyono dan Usman Hamid (eds.), *Merancang Arah Baru
Demokrasi: Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kepustakaan Populer
Gramedia, 2014.
- Oetomo, Dede. *Glosarium Istilah Orientasi Seksual, Identitas dan Ekspresi Gender
dan Sifat-sifat Seks*. Surabaya: Gaya Nusantara, 2019.
- Priyadi, Arief. “Reformasi di Mata Keluarga Korban Pelanggaran HAM” dalam AE
Priyono dan dan Usman Hamid (eds.), *Merancang Arah Baru Demokrasi:
Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014.
- Manfred Nowak, “Hak Atas Pendidikan”, dalam Ifdhal Kasim dan Johannes dan
Masenus Arus (eds.), *Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya: Esai-esai Pilihan*.
Jakarta: Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat, 2001.
- Raho, Bernard. *Sosiologi*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2016.
- Ramly, Nadjamuddin. *Membangun Pendidikan Yang Memberdayakan dan
Mencerahkan*. Jakarta: Grafindo, 2005.
- Rizal Panggabean, Samsu. *Konflik dan Perdamaian Etnis di Indonesia*. Jakarta: PT
Pustaka Alvabet, 2018.

- Sen, Amartya. *Kekerasan dan Identitas*, penerj. Arif Susanto. Jakarta: Marjin Kiri, 2016.
- Setara Institute*, “Atas Nama Agama (Pelanggaran Terhadap Minoritas Agama di Indonesia)”, April 2021.
- Syam, Nur. *Tantangan Multikulturalisme Indonesia Dari Radikalisme Menuju Kebangsaan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009.
- Stokke, Kristian. “Politik Kewargaan: Kerangka Analisis”, dalam Eric Hiariej dan Kristian Stokke (eds.), *Politik Kewargaan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2018.
- Tan, Peter. *Paradoks Politik: Pertautannya dengan Agama dan Kuasa di Negara Demokrasi*. Yogyakarta: Penerbit Gunung Sopai, 2018.
- Thorson Plesner, Ingvill. “Memajukan Toleransi Melalui Pendidikan Agama”, dalam Tore Lindholm, W. Cole Durham dan Bahia G. Tahzib Lie (eds.), penerj. Rafael Edy Bosko dan M. Rifa’I Abduh, *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh?* Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010.
- Ubaedillah, A. dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2013.
- Wattimena, Reza A.A. *Demokrasi: Dasar Filosofis dan Tantangannya*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2016.
- Wibowo, A. Setyo. *Paideia: Filsafat Pendidikan-Politik Platon*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2017.

JURNAL ILMIAH

- Azra, Azyumardi. "Revitalisasi Wawasan Kebangsaan Melalui Pendidikan Multikultural". *Jurnal Ledalero*, 18:2, Desember 2019.
- Daven, Mathias. "Arus Balik: Gerakan Fundamentalisme dalam Islam". *Jurnal Ledalero*, 13:2, Desember 2014.
- Davies, Lynn. "Teaching About Conflict Through Citizenship Education". *International Journal of Citizenship and Teacher Education*, 1:2, Desember 2005.
- Deakin Crick, Ruth. "Citizenship Education and The Provision of Schooling: A Systematic Review of Evidence". *International Journal of Citizenship and Teacher Education*, 1:2, Desember 2005.
- Fadhli, Yogi Zul. "Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Perspektif HAM dan Perlindungan Hukumnya di Indonesia". *Jurnal Konstitusi*, 11:2, Juni 2014.
- Fuad, Nurhattati. "Penanaman Toleransi beragama Pada Anak Melalui Pendidikan". *Jurnal Societas Dei*, 2:1, April 2015.
- Husen Arif, Beston. "The Role of Citizenship Education in Developing Democracy in Iraq". *International Journal of Social Sciences and Educational Studies*, 5:2, Desember 2018.
- Ida Ravnbol, Camilla. "The Human Rights of Minority Women: Romani Women's Rights from the Perspective on International Human Rights Law and Politics". *International Journal on Minority and Group Rights*, 17:1, June 2010.
- Keladu Koten, Yosef. "Kampanye Strategis Melawan Radikalisme: Merancang Model Pendidikan Multikultural". *Jurnal Ledalero*, 17:1, Juni 2018.
- Kymlicka, Will and Wayne Norman, "Return of the Citizen: A Survey of Recent Work on Citizenship Theory". *Ethics*, 104:2, January 1994.
- Madung, Otto Gusti. "Pancasila, Demokrasi Liberal dan Komunitarisme". *Jurnal Ledalero*, 13:2, Desember 2014.

- Mihandoost, Fatemeh and Bahman Babajanian. "The Rights of Minorities in International Law". *Journal of Politics and Law*, 9:6, June 2016.
- Molan, Benyamin. "Pluralitas Agama dan Konflik Beragama". *Respons: Jurnal Etika Sosial*, 19:1, Juni 2014.
- ". "Reposisi Pancasila dengan Membuka Ruang Bagi Konstruksi Budaya". *Respons Jurnal Etika Sosial*, 22:2, Desember 2017.
- Mundzir, Ilham. "Negara, Hak-hak Minoritas dan Multikulturalisme (Kasus Ahmadiyah)". *Jurnal Indo-Islamika*, 1:2, Desember 2012.
- Nasution, M. Imaduddin. "Demokrasi dan Politik Minoritas di Indonesia". *Politica*, 4:2, November 2013.
- Nugroho, Heru. "Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia". *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 1:1, Mei 2012.
- Regus, Max, Marianus Supar Jelahun dan Antonius Nesi. "Dinamika HAM dalam Perbincangan Tiga Dimensi: Tinjauan Konseptual dan Praktis". *Jurnal Ledalero*, 19:2, Desember 2020.
- Samho, Bartolomeus. "Pendidikan Karakter dalam Kultur Globalisasi: Inspirasi dari Ki Hajar Dewantara". *Jurnal Melintas*, 30:3, Desember 2014.
- Setiawan, Deny. "Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Karakter Melalui Penerapan Pendekatan Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan". *Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, 6:2, Desember 2014.
- Sihotang, Kasdin. "Berpikir Kritis: Sebuah Tantangan Dalam Generasi Digital". *Respons Jurnal Etika Sosial*, 22:2, Desember 2017.
- Sumika Putri, Nella. "Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Agama Minoritas dalam Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal VeJ*, 4:1, Juni 2018.

ARTIKEL MAJALAH, SURAT KABAR, MANUSKRIP DAN INTERNET

Assyaukanie, Luthfi. “Tantangan Kebebasan Berpikir dan Berekspresi di Indonesia”.

Prisma, 30:1, Juni 2011.

BBC News Indonesia 12 Juni 2020. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia/-53009570>, diakses 10 Maret 2021.

Gerung, Rocky. “Komunitarisme Versus Hak Asasi Manusia”. *Prisma*, 30:1, Juni 2011.

Hanif, Hasrul. “Demokrasi Tak Terlembagakan?”. *Prisma*, 36:1, Juni 2017.

<https://www.google.com/amp/s/nasional/.tempo.co/panitia-gereja-karimun-dilaporkan-atas-dugaan-menista-agama>, diakses pada tanggal 20 Maret 2020.

<https://m.cnnindonesia.com/nasional/20201113130007-20-569400/penjelasan-panitia-soal-pemilihan-ketua-osis-smn-6-depok>, diakses 22 November 2020.

K. C. Laksana, Ben dan Rara Sekar Larasati, “Menggugat Pendidikan: 8 Buku Yang Akan Mengubah Pandanganmu Secara Radikal Tentang Pendidikan”, *Indoprogress*, 21 September 2020.

Kleden, Paul Budi. “Pendidikan Multikultural dan Persoalan Disintegrasi Bangsa”, *Majalah VOX* Seri 58/02/2013.

Kompas, “Mahasiswa Papua Terlibat Bentrok dengan Warga di Kota Malang”, 15 Agustus 2019.

Kompas, “Kaleidoskop 2019: Pengepungan Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya, 26 Desember 2019.

Kompas, “Kapolresta Malang Dilaporkan atas Dugaan Rasialisme terhadap Mahasiswa Papua, 12 Maret 2021.

Only Putra, Eduardus. “Konsep Politik Pengakuan dan Kontribusinya dalam Mengatasi Masalah Diskriminasi Terhadap LGBT di Indonesia”. Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2019.

- Robet, Robertus. “Meninjau Kembali Negara Organik: Hak Asasi dan Demokrasi Pasca-Reformasi”. *Prisma*, 39:1, Juni 2020.
- Setiawan, Hery. “Eksklusivisme Beragama Mencengkram Pendidikan”, dalam *Majalah Basis* Nomor 07-08, Tahun ke-68, 2019.
- Supelli, Karlina. “Masyarakat Terbuka: Catatan Kritis untuk Pesona Sebuah Konsep”, *Prisma*, 30:1, Juni 2011.
- Tempo*, 22 Oktober 2019.
- Tempo*, “Praktek Diskriminasi Terhadap Orang Tionghoa”, 25 Februari 2018.
- Tempo*, 25 Desember 2019.
- Tempo*, “Non-Muslim Ditolak di Bantul, Karena Aturan Dusun”, 3 April 2019.
- Tempo*, 22 Juli 2020.
- Tempo*, “Pelanggaran Terkait Dugaan Diskriminasi Kepada Dua CPNS Difabel”, 24 Juli 2020.
- [Tirto.id/andrew-budikusuma-mengaku-dipukuli-dan-dilontari-kata-kata-rasis-oleh-sejumlah-pria-di-jakarta](https://tirto.id/andrew-budikusuma-mengaku-dipukuli-dan-dilontari-kata-kata-rasis-oleh-sejumlah-pria-di-jakarta), diakses 12 November 2020.
- [Tirto.id/razia-lgbt-wali-kota-depok-hanya-perparah-stigma-dan-diskriminasi](https://tirto.id/razia-lgbt-wali-kota-depok-hanya-perparah-stigma-dan-diskriminasi), diakses 11 Maret 2021.
- [Tirto.id/polri-pecat-anggota-karena-orientasi-seks-homofobia-&-diskriminasi](https://tirto.id/polri-pecat-anggota-karena-orientasi-seks-homofobia-&-diskriminasi), diakses 11 Maret 2021.
- [Tirto.id/cerita-pemilik-indekos-&-transpuan-di-jakarta-yang-terancam-haknya](https://tirto.id/cerita-pemilik-indekos-&-transpuan-di-jakarta-yang-terancam-haknya), diakses 12 Maret 2021.

